
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH MELALUI SEKTOR PARIWISATA

Theresia Octastefani
Bayu Mitra Adhyatma Kusuma

(Universitas Gadjah Mada, Jl. Socio Justicia 2 Yogyakarta,
email: theresiaoctastefani@gmail.com)

(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta,
email: bayumitraa.kusuma@yahoo.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata (studi pada Pantai Balekambang, Kabupaten Malang). Peneliti menggunakan perspektif *New Public Management* dalam menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif, dengan analisis data interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Malang telah menjalankan peranannya sebagai *entrepreneur*, koordinator, fasilitator, dan stimulator dengan semaksimal mungkin untuk mampu meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Meskipun pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada kendala atau hambatan yang harus dihadapi dalam memainkan peranan pemerintah daerah tersebut.

Kata Kunci: peran pemerintah daerah, pembangunan ekonomi daerah, pariwisata

THE ROLE OF MALANG REGENCY GOVERNMENT IN IMPROVING LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TOURISM SECTOR

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the role of Malang Regency Government in improving the local economic development through the tourism sector, in this case Balekambang Beach particularly. To analyze this problem, the researchers used the perspective of the New Public Management. This research uses qualitative type of research, descriptive analysis approach, and the interactive data analysis methods of Miles and Huberman. The research results showed that in improving the local economic development through the tourism sector, Malang Regency Government has to play its role as an entrepreneur, coordinator, facilitator, and stimulator with as much as possible to be able to boost regional economic development. Despite in the fact cannot be denied that there are still obstacles or barriers that must be faced in playing the role of the government.

Keywords: role of local government, local economic development, tourism

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah berlangsung lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan hingga mencapai puncaknya pada era reformasi dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. UU No. 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat 5, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke masing-masing daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) diharapkan dapat menjadikan daerah otonom yang bersangkutan untuk lebih maju, mandiri, sejahtera, dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

Dalam konteks otonomi daerah setiap daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah yang dimiliki. Salah satu sektor potensial yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah adalah sektor pariwisata. Pembangunan di bidang pariwisata merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini mengingat hampir di setiap daerah (kabupaten/kota) pasti memiliki obyek wisata, mulai dari yang belum dikenal hingga yang sudah terkenal. Provinsi Bali

dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dua contoh daerah yang berhasil mengembangkan pariwisatanya sehingga menjadi sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi daerah (Pitana dan Gayatri, 2005:111). Keberhasilan sektor pariwisata di kedua daerah ini tidak terlepas dari peran serta pemerintah sebagai penanggungjawab utama.

Salah satu daerah yang juga berupaya membangun ekonomi daerah di sektor pariwisata adalah Kabupaten Malang. Hal ini sebagaimana yang tertuang di Perda Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 yang telah dirumuskan dan disepakati bersama antara stakeholders pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Malang sebagai Bumi Agro-Wisata yang terkemuka di Jawa Timur. Secara kuantitas, Kabupaten Malang memiliki 52 obyek wisata yang terdiri dari obyek wisata gunung, wisata air, wisata pantai, wisata agro, wisata sejarah, dan wisata religi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Malang, 2012). Namun hingga kini, belum semua obyek wisata tersebut dapat dikelola dengan baik dan optimal oleh pemerintah daerah. Padahal, Kabupaten Malang merupakan salah satu tujuan destinasi para wisatawan, khususnya yang berasal dari Jawa Timur. Pengelolaan terhadap obyek wisata yang kurang optimal, tentu saja akan berpengaruh terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung. Berikut ini data perkembangan wisatawan yang mengunjungi obyek wisata Kabupaten Malang Tahun 2008-2011.

Tabel 1.
Data Perkembangan Wisatawan Kabupaten Malang Tahun 2008-2011

Uraian	Satuan	2008	2009	2010	s/d 30 Juni 2011
Jumlah Wisatawan	orang	2.371.099	1.876.132	1994.425	969.213
- Domestik	orang	4.633	3.752	4.964	2.407
- Mancanegara					
Jumlah	orang	2.375.732	1.879.884	1.949.389	971.620

Sumber: Diolah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Malang (2012)

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perkembangan wisatawan yang mengunjungi obyek wisata di Kabupaten Malang dari tahun 2008-2011 mengalami pasang surut. Pasang surut jumlah wisatawan ini menjadi tugas rumah bagi pemerintah untuk segera membenahi keberadaan sektor pariwisatanya. Pemerintah Kabupaten Malang dituntut untuk mampu mengelola sektor pariwisatanya sebagai modal dasar pembangunan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa sektor pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Malang menjadi salah

satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dari waktu ke waktu sehingga pendayagunaan potensi yang ada harus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dari 52 obyek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Malang, Pantai Balekambang dipilih dan dijadikan sebagai ikon wisata Kabupaten Malang karena memberikan corak khusus terhadap perekonomian daerah. Obyek wisata ini mampu menggerakkan seluruh potensi perekonomian yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Untuk mengoptimalkan obyek wisata ini, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menunjuk Perusahaan Daerah (PD) Jasa Yasa sebagai pengelola Pantai Balekambang. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.8 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa. Pengelolaan potensi obyek wisata ini harus dilaksanakan secara optimal sehingga sebagai ikon wisata Kabupaten Malang diharapkan mampu menjadi salah satu gerbong lokomotif bagi pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui obyek wisata Pantai Balekambang? Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis sejauh mana peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata (studi pada Pantai Balekambang, Kabupaten Malang).

LANDASAN TEORETIS

Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan salah satu bagian dari administrasi publik. Administrasi pembangunan mempunyai fokus analisis berupa proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu negara dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menyingkirkan ancaman (Siagian, 2005). Menurut Tjokroamidjojo (1974:9-10), administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara yang baru berkembang;
 2. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaannya yang efektif;
 3. Lebih berorientasi pada masa depan;
 4. Administrasi pembangunan lebih bersifat *development agent*;
-

5. Administrasi pembangunan harus mengkaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain;
6. Dalam administrasi pembangunan administrator dalam aparatur pemerintahan juga bisa merupakan badan penggerak perubahan (*change agents*);
7. Lebih berpendekatan pada lingkungan (*ecological approach*) berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus oleh aparatur pemerintah demi tercapainya tujuan dengan memberikan perhatian kepada masyarakat dan lingkungan di berbagai bidang, salah satunya adalah pembangunan ekonomi daerah.

Pembangunan Ekonomi Daerah

Saat ini tidak ada suatu teori pun yang mampu untuk menjelaskan tentang pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun, ada beberapa teori yang secara parsial yang dapat membantu memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (2004:298), adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Sehingga kita perlu melakukan pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: Segi pembangunan sektoral, pencapaian sasaran pembangunan dilakukan melalui berbagai pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral disesuaikan dengan yang dimiliki oleh masing-masing daerah; Segi pembangunan wilayah, yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah; Segi pemerintahannya, agar tujuan pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pembangunan daerah perlu berfungsi dengan baik karena itu pembangunan merupakan usaha-usaha untuk mengembangkan dan mempererat pemerintah daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab

(Tjokrowidjojo, 1994:23). Salah satu strategi menjanjikan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah melalui sektor pariwisata.

Pariwisata

Pariwisata sudah diakui sebagai industri terbesar abad ini, dilihat dari berbagai indikator, seperti sumbangan terhadap pendapatan dunia dan penyerapan tenaga kerja (Pitana dan Gayatri, 2005:110). Menurut Pendit (2006:3) istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sansekerta yang komponennya terdiri dari pari, wis, ata. “Pari” artinya penih, lengkap, berkeliling. “Wis” artinya rumah, properti, kampung, komunitas. Dan “ata” yang berarti pergi terus-menerus, mengembara. Sehingga apabila dirangkai menjadi satu kata akan melahirkan istilah pariwisata, yang berarti pergi secara lengkap meninggalkan rumah berkeliling terus menerus. Sedangkan dari UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mendefinisikan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, peneliti menggunakan perspektif *New Public Management*.

New Public Management

Mulai tahun 1990-an ilmu administrasi publik mengenalkan paradigma baru yang sering disebut *New Public Management* (Hood, 1991). Walaupun juga disebut dengan nama lain misalnya *Post-bureaucratic Paradigm* (Barzeley, 1992), dan *Reinventing Government* (Osborne dan Gaebler, 1992), tetapi secara umum disebut NPM karena berangkat dari gagasan Christopher Hood sebagai awal mula paradigma alternatif. Salah satu model pemerintahan di era NPM adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) dalam Mardiasmo (2002), yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep *reinventing government*. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah:

1. Pemerintahan katalis, fokus pada pemberian pengarahan, bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya;
 2. Pemerintahan milik masyarakat, memberdayakan masyarakat daripada melayani. Pemerintah sebaiknya memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendirinya;
 3. Pemerintah yang kompetitif, menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan
-

- kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya;
4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi;
 5. Pemerintah yang berorientasi hasil, membiayai hasil bukan masukan;
 6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi;
 7. Pemerintahan wirausaha, mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan;
 8. Pemerintah antisipatif, berupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah wirausaha tidak reaktif tetapi proaktif. Ia tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tetapi juga berupaya keras untuk mengantisipasi masa depan. Ia menggunakan perencanaan strategis untuk menciptakan visi;
 9. Pemerintah desentralisasi, dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja;
 10. Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar, mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Situs penelitian dilakukan pada Perusahaan Daerah (PD) Jasa Yasa bagian UPT Pantai Balekambang. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: *in-depth interview*, observasi, dan studi pustaka. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis interaktif Miles and Huberman yang terdiri dari empat tahap, yaitu: pengumpulan data (*data collecting*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan menarik kesimpulan (*conclusion*). Menentukan fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam proses penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah meliputi empat aspek peranan, yaitu sebagai *entrepreneur*, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Adapun informan dari penelitian ini adalah para stakeholder pariwisata di Kabupaten Malang meliputi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, PD. Jasa Yasa, UPT. Pantai Balekambang, dan masyarakat sekitar. Dengan demikian peneliti menggambarkan karakteristik dari objek yang akan diperiksa untuk mendapatkan hasil yang faktual dan sistematis untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan disimpulkan oleh pembaca.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial untuk membangun perekonomian daerah. Pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (2004:298) adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, maka peran dari berbagai pihak khususnya peran pemerintah daerah itu sendiri sangat dibutuhkan. Arsyad (2004:312-313) menjelaskan bahwa peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses meningkatkan pembangunan ekonomi daerah terbagi menjadi empat, yaitu peran sebagai: *entrepreneur*, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut penjelasan mengenai peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui obyek wisata Pantai Balekambang.

Peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui obyek wisata Pantai Balekambang

Sebagai *Entrepreneur*

Menurut Arsyad (2004:312) dijelaskan bahwa dengan adanya peran pemerintah sebagai *entrepreneur*, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan usaha bisnis. Salah satu usaha bisnis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yaitu dengan mewirauasakan Pantai Balekambang. Wirausaha ini dilakukan oleh Pemerintah karena obyek wisata Pantai Balekambang memberi kontribusi berarti terhadap pembangunan ekonomi daerah yang ditunjukkan dengan besarnya alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini rincian pengalokasian pendapatan yang diperoleh dari obyek wisata Pantai Balekambang dibagi menjadi empat bagian yaitu: 55% untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), 30% untuk cadangan umum PD. Jasa Yasa, 10% untuk kenaikan gaji pegawai, dan 5% untuk jasa produksi (Wawancara dengan Henry Djoenianto, Kepala Seksi Perencanaan dan Litbang PD. Jasa Yasa, tanggal 15 Desember 2011 pukul 14.00 WIB).

Tabel 1.
Pengalokasian Pendapatan PD. Jasa Yasa Melalui Obyek Wisata Pantai
Balekambang Tahun 2008-2011

Tahun	Pendapatan	PENGALOKASIAN PENDAPATAN (100%)			
		55% PAD	30% Cadangan Umum PD. Jasa Yasa	10% kenaikan Gaji Pegawai	5% Jasa Produksi
2008	1.262.894.500	694.591.975	378.868.350	126.289.450	63.144.725
2009	1.589.749.700	874.362.335	476.924.910	158.974.970	79.487.485
2010	1.535.963.500	844.779.925	460.789.050	153.596.350	76.798.175
2011	1.581.681.850	869.925.017,5	474.504.555	158.168.185	79.084.092,5
Jumlah	5.970.288.550				

(Sumber: Dokumen Resmi PD. Jasa Yasa, 2012)

Selain memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Malang, tumbuhnya perekonomian di sekitar Pantai Balekambang juga mengundang sektor retail pasar modern seperti Indomart, Alfamart dan sejenisnya menjamur di kawasan menuju pantai ini. Peran Pemerintah Kabupaten Malang ini juga dapat dilihat dari sisi paradigma *New Public Management* atau *Reinventing Government*. Dalam paradigma ini menekankan pada perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien dengan prinsip “The Invisible Hand”-nya Adam Smith, yaitu mengurangi peran pemerintah, membuka peran swasta dan pemerintah lebih berfokus pada kepentingan publik yang lebih luas (Osborne dan Gaebler, 1992).

Sebagai Koordinator

Menurut Arsyad (2004:312), pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan daerahnya. Karena berperan sebagai koordinator, maka peran Pemerintah Kabupaten Malang lebih ditekankan pada: Pertama, merencanakan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai sektor yang berkaitan dengan pariwisata. Menurut Wahab (2003:5), pariwisata dapat diartikan sebagai salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup, serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, unsur ekonomilah yang paling dekat dengan inti kegiatan pariwisata. Pakar ekonomi memperkirakan sektor pariwisata akan menjadi salah satu kegiatan ekonomi penting pada abad ke 21. Dalam perekonomian negara atau daerah, peran sektor pariwisata jika dikembangkan secara berencana dan terpadu, hasilnya akan melebihi sektor migas (minyak bumi dan gas alam), serta mampu

mengangkat sektor industri lainnya. Dengan demikian, sektor pariwisata akan berfungsi sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*).

Pemerintah Kabupaten Malang juga telah merencanakan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis sektor lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Hal ini telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai salah satu strategi pencapaian visi-misi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Malang untuk 5 tahun ke depan dengan slogan “Kabupaten Malang sebagai Bumi Agro-Wisata yang terkemuka di Jawa Timur”. Sesuai dengan slogan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai sektor yang mampu mengangkat sektor-sektor lain yang dimiliki oleh Kabupaten Malang. Penggabungan kedua sektor ini diharapkan dapat berkembang dengan pesat sehingga mampu mendorong bergeraknya sektor pembangunan daerah lainnya, seperti sektor perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan, dan lain sebagainya. (Wawancara dengan A. Zakaria, Kabid Objek Wisata Disbudpar Kabupaten Malang, tanggal 11 Oktober 2011 pukul 10.05 WIB).

Kedua, merencanakan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) dan pengembangan wilayah. Pemerintah Kabupaten Malang juga berperan dalam merencanakan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Perencanaan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara membangun Jalan Lintas Selatan (JLS). Pembangunan ini bermanfaat sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi terutama wilayah selatan Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi terutama untuk wilayah selatan Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi yang beragam dan belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan dibangunnya JLS yang ada di Kabupaten Malang, harapannya akan berdampak bagi peningkatan obyek wisata, khususnya pantai selatan Jawa, salah satunya Pantai Bakembang. Sedangkan perencanaan pengembangan wilayah sektor pariwisata Kabupaten Malang diarahkan pada pengembangan kawasan sebagai berikut: Gunung Bromo di Kecamatan Poncokusumo; Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari; Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang; Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; dan Paket Pantai Selatan Malang yang meliputi Pantai Kondang Merak, Ngliyep, Bajul Mati, dan Goa Cina. Paket-paket pengembangan wilayah ini merupakan fokus dari Pemerintah Kabupaten Malang.

Ketiga, merencanakan pembangunan fasilitas listrik, air bersih, pembuangan sampah dan telekomunikasi. Pembangunan fasilitas listrik, air bersih, pembuangan sampah, dan telekomunikasi merupakan bagian dari pembangunan prasarana umum pariwisata. Yoeti (1996:192) menyebutkan bahwa yang dimaksud prasarana umum adalah prasarana yang menyangkut kehidupan orang banyak (umum) yang pengadaannya bertujuan untuk membantu kelancaran

roda perekonomian. Di dalam pelaksanaannya, perencanaan untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas ini seharusnya menjadi sasaran dan tujuan pemerintah untuk mengoptimalkan suatu obyek wisata. Tapi pada kenyataannya dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, perencanaan pembangunan fasilitas listrik, air bersih, pembuangan sampah, dan telekomunikasi hingga saat ini belum menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten bersama dinas terkait.

Keempat, merencanakan tersedianya keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan wisata dan para wisatawan. Perencanaan keamanan yang baik bagi wisatawan merupakan hal mutlak untuk dilakukan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Pihak UPT Balekambang juga telah menyiapkan sejumlah Tim SAR. Tugas mereka, di bagi menjadi beberapa regu. Fungsinya adalah untuk mengawasi pengunjung Pantai Balekambang agar tidak terlalu mendekati batas garis pantai yang sudah ditetapkan. Selain perencanaan terhadap keselamatan wisatawan, perencanaan keamanan kendaraan juga menjadi perhatian karena keamanan ini merupakan tanggungjawab bersama baik pengelola, petugas, serta wisatawan itu sendiri. Dengan terciptanya suasana yang aman dan nyaman, maka akan memotivasi atau mendorong masyarakat untuk kembali lagi ke obyek wisata ini.

Kelima, menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan obyek wisata Pantai Balekambang. Peran Pemerintah Kabupaten Malang sebagai pembuat kebijakan terhadap pengelolaan obyek wisata ini tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang menjadi acuan proses pembangunan daerah pada tingkat mikro. Pembangunan pariwisata sebagai salah satu sektor perekonomian berkelanjutan (*sustainable development*). Berikut ini kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang dalam pengelolaan obyek wisata Pantai Balekambang didasarkan pada:

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Perda Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
3. Perda No. 8 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa.

Keberhasilan pembangunan pariwisata di setiap daerah sangat tergantung dari baik dan buruknya perencanaan pembangunan di daerahnya. Kegiatan perencanaan tersebut tidak bisa lepas dari pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya yang ada, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Malang sebagai koordinator memiliki peran yang sangat penting dan dinamis dalam pembangunan ekonomi daerah.

Sebagai Fasilitator

Pemerintah Kabupaten Malang merupakan fasilitator dalam pembangunan fasilitas utama pendorong obyek wisata Pantai Balekambang. Hal ini sejalan

dengan fokus pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, dimana fokus pembangunan pariwisata diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur jalan menuju Pantai Balekambang, Jalan Lintas Selatan (JLS) dan pengembangan wilayah, serta pada optimalisasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur berupa jalan merupakan prasarana pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap suatu pengembangan pariwisata. (Wawancara dengan A. Zakaria, Kabid Objek Wisata Disbudpar Kabupaten Malang, tanggal 11 Oktober 2011 pukul 10.05 WIB). Berdasarkan hasil penelitian, kondisi infrastruktur jalan menuju Pantai Balekambang telah banyak mengalami kerusakan sehingga menghambat perjalanan para wisatawan. Meskipun jalan tersebut masih bisa dilalui, namun kenyamanan dan keamanan pengunjung saat melewati jalan tersebut juga harus diperhatikan.

Pembangunan JLS merupakan pembangunan jalan baru yang membentang sepanjang pesisir pantai selatan Jawa Timur mulai dari Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga Kabupaten Banyuwangi. Untuk pembangunan JLS yang menghubungkan Kabupaten Malang merupakan salah satu dari tiga infrastruktur yang nantinya akan dijadikan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya, pembangunan JLS masih memiliki kendala pada adanya sebagian lahan milik Perhutani yang terpaksa harus dibebaskan untuk penyelesaian proyek pembangunan JLS. Harapan terbesar Pemerintah Kabupaten Malang sebagai fasilitator pembangunan adalah dengan adanya JLS yang melewati Kabupaten Malang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, baik untuk kepentingan daerah Kabupaten Malang itu sendiri dan juga untuk warga sekitar Kabupaten Malang diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatannya. Sehingga kedepannya, pembangunan ekonomi antara daerah dan masyarakat dalam bertumbuh beriringan (Wawancara dengan Sunardi, Kepala UPT Pantai Balekambang, tanggal 3 Oktober 2011 pukul 10.35 WIB).

Sebagai fasilitator pembangunan, peran pemerintah Kabupaten Malang juga terfokus pada masalah optimalisasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan pariwisata juga harus memperhatikan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Menurut batasan yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa “Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang menentukan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya”. Dengan kata lain pelestarian lingkungan merupakan aspek yang perlu dijaga keseimbangannya. Sehingga dalam pembangunan ekonomi daerah, dengan pengoptimalisasian dan pemanfaatan

obyek wisata Pantai Balekambang juga harus didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan (*environment development*).

Sebagai Stimulator

Menurut Arsyad (2004:313) dijelaskan bahwa peran pemerintah daerah sebagai stimulator dapat ditunjukkan dengan menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, sebagai stimulator maka peran Pemerintah Kabupaten Malang ditunjukkan dengan cara menciptakan iklim investasi. Pemerintah Kabupaten Malang memandang bahwa pembangunan ekonomi berarti pengelolaan kekuatan ekonomi potensial yang menjadi kekuatan ekonomi nyata melalui penanaman modal. Obyek wisata Pantai Balekambang merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki keanekaragaman potensi yang dapat dijadikan sebagai tempat penanaman modal. Sehingga, untuk pelaksanaannya, penanaman modal yang ada di sekitar obyek wisata Pantai Balekambang hingga saat ini masih belum ada. (Wawancara dengan Sunardi, Kepala UPT Pantai Balekambang, tanggal 3 Oktober 2011 pukul 10.35 WIB). Berdasarkan hasil penelitian, alasan pokok kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya di obyek wisata Pantai Balekambang adalah kondisi jalan menuju Pantai Balekambang yang masih rusak, sehingga investor memperkirakan apabila dengan kondisi jalan rusak dan tidak segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang bersama dinas terkait, maka jumlah pengunjung yang menuju Pantai Balekambang akan sedikit demi sedikit berkurang, selain itu hal ini juga dikarenakan kurangnya prasarana jaringan listrik dan telekomunikasi di sekitar obyek wisata Pantai Balekambang.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya untuk memperbaiki kondisi jalan yang merupakan salah satu infrastruktur penting karena digunakan sebagai akses jalan, baik jalan menuju Pantai Balekambang maupun dengan adanya pembangunan Jalan Lintas Selatan. Pemerintah Kabupaten Malang berharap di tahun 2012, investor mau menanamkan modalnya di sekitar obyek wisata Pantai Balekambang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Malang memandang adanya penanaman modal dan investasi di sekitar obyek wisata Pantai Balekambang ini sebagai upaya mempercepat pembangunan ekonomi dan mengerakkan sektor lain sebagai penunjang. (Wawancara dengan A. Zakaria, Kabid Objek Wisata Disbudpar Kabupaten Malang, tanggal 11 Oktober 2011 pukul 10.05 WIB). Untuk dapat menunjang iklim investasi di obyek wisata Pantai Balekambang, maka perlu dilakukannya usaha melalui promosi wisata. Untuk lebih

memperkenalkan obyek-obyek wisata yang dikelola oleh PD Jasa Yasa, khususnya obyek wisata Pantai Balekambang, maka diperlukan promosi wisata. Promosi wisata merupakan suatu sarana yang sangat berguna sebagai usaha untuk memperkenalkan dan memberikan informasi seputar tempat-tempat wisata.

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut, pihak PD Jasa Yasa Kabupaten Malang melakukan berbagai kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, dan juga bekerja sama dengan pihak swasta. Dengan adanya promosi wisata melalui *Tourist Information Service* (TIS) PD Jasa Yasa Kabupaten Malang diharapkan di tahun 2011 dan tahun mendatang, jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara dapat segera meningkat. Selain itu, melalui promosi wisata ini tidak hanya memperkenalkan Pantai Balekambang saja sebagai daya tarik wisata alam, melainkan juga memperkenalkan obyek wisata lainnya yang dimiliki oleh Malang Raya agar ikut berkembang juga. Meskipun di dalam pelaksanaannya, TIS belum mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, peran pemerintah Kabupaten Malang sebagai *entrepreneur*, koordinator, fasilitator dan stimulator harus dapat berjalan dengan seimbang agar dapat mencapai kesuksesan dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui obyek wisata Pantai Balekambang.

Simpulan dan saran

1. Simpulan

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu program andalan Pemerintah Kabupaten Malang dan saat ini obyek wisata Pantai Balekambang dijadikan sebagai ikon wisata Kabupaten Malang. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui obyek wisata Pantai Balekambang, Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya untuk dapat menjalankan peranannya sebagai *entrepreneur*, koordinator, fasilitator dan stimulator dengan semaksimal mungkin. Dimana dari keempat peran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Sebagai *entrepreneur*, pemerintah Kabupaten Malang mampu meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata dari tahun ke tahun. Sebagai koordinator, Pemerintah Kabupaten Malang telah berhasil menciptakan perencanaan yang terpadu dalam pengembangan Pariwisata melalui RPJMD 2010-2015 dan Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa yang mengelola sektor Pariwisata. Sebagai fasilitator, pemerintah Kabupaten Malang memfokuskan pembangunan pariwisata yang diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur Jalan Lintas Selatan (JLS) dan pengembangan wilayah. Dan sebagai stimulator,

Pemerintah Kabupaten Malang mampu menarik para investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata dengan Perusahaan Daerah Jasa Yasa selaku pengelola.

2. Saran

Saran yang peneliti berikan antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Malang sebaiknya membuat anggaran dan memberikan bantuan dana sebagai upaya memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata sehingga akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya.
- b. Perbaikan kondisi jalan seharusnya tetap menjadi prioritas.
- c. Perlu menambah jumlah sarana transportasi umum seperti angkutan atau bis mini untuk memudahkan wisatawan yang tidak memiliki sarana transportasi.
- d. Meningkatkan kerjasama yang baik antara Bappeda dengan pihak Perhutani dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang digunakan sebagai proyek pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS).
- e. Perusahaan Daerah Jasa Yasa sebagai pengelola obyek wisata Pantai Balekambang sebaiknya lebih berupaya lagi untuk mengoptimalkan promosi wisata yang intens dan berkelanjutan baik melalui media cetak, elektronik, event dan pameran wisata, menjalin kerjasama dengan biro travel dan hotel serta membuat website agar lebih dikenal secara luas dan kunjungan wisatawan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- _____. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPSTIE YKPN.
- Kabupaten Malang. 2006. *Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa*.
- Kabupaten Malang. 2011. *Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015*
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Good Governance*. Yogyakarta: Andi.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. *Mewirusaha Birokrasi*, terj. Abdul Rasyid. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Pitana, I Gede Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
-

Republik Indonesia. *UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia. *UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.*

Republik Indonesia. *UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Siagian, Sondang, P. 2005. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan
Strateginya.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, B. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan.* Jakarta: LP3ES.

Yoeti, Oka.1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata.* Bandung: Angkasa.
